

PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA WISATA BANJARAN, KABUPATEN BANTUL

*(Development of A Community Based Tourism Village in Banjaran Tourism Village,
Bantul District)*

RESTU ANGGI PRAWESTI*) DAN AGUSTINA RAHMAWATI

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 55283*

E-mail corespondensi: restuanggiprawesti@students.amikom.ac.id

ABSTRACT

Community Based Tourism (CBT) is a new concept in empowering local communities as the main actors in tourism management with the aim of empowering communities in the economic sector. Banjaran Tourism Village as an educational, historical, dan culture tourism village is one of the villages that has extraordinary natural potential because of its strategic location and close to the Selarong Cave tourist attraction, making Banjaran Tourism Village known as a complementary tourist attraction to Selarong Cave which was developed by BUMDes Guwosari, Bantul Regency. This research specifically discusses the development of management of the Banjaran Tourism Village using the CBT concept. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, in-depth interviews and documentation. This research aims to identify and analyze the development of tourist villages using the CBT concept in the Banjaran Tourism Village. This research succeeded in looking at community participation activities or the role of the community in key CBT arrangements in the Yaman and Mohd 2004 theory, where the role of the community has a significant role in the management of tourism villages. The result of this research are, 1)Community participation in the management of the Banjaran Tourism Village has not been able to capture key indicator of CBT regulation due to the lack of qualifications that the community has in terms of tourism village development, 2)Community participation as or manager of the Banjaran Tourism Village has had a positive impact for local communities in terms of reminding them of their independence and improving their standard of living by participating in efforts to regulate the CBT concept. Researchers hope that the management of the Banjaran Tourism Village can be optimized so that it can achieve that goal of community empowerment in truly sustainable tourism.

Keywords: Community Based Tourism, Community Participation, Tourism Village Development

ABSTRAK

Pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) merupakan konsep baru dalam memberdayakan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan kepariwisataan dengan tujuan agar masyarakat bisa berdaya dalam bidang ekonomi. Desa Wisata Banjaran sebagai desa wisata edukasi, sejarah dan budaya merupakan salah satu desa yang memiliki potensi alam yang begitu luar biasa karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan objek Wisata Goa Selarong sehingga membuat Desa Wisata Banjaran dikenal sebagai tempat wisata pelengkap Goa Selarong yang di kembangkan oleh BUMDes Guwosari, Kabupaten Bantul. Penelitian ini secara spesifik membahas mengenai pengembangan pengelolaan Desa Wisata Banjaran dengan menggunakan konsep CBT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengembangan desa wisata dengan menggunakan konsep CBT di Desa Wisata Banjaran. Penelitian ini berhasil melihat aktivitas partisipasi masyarakat ataupun peran dari masyarakat dalam kunci pengaturan CBT pada Teori Yaman & Mohd 2004, dimana peran dari masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan Desa Wisata. Hasil dari penelitian ini yakni, 1)Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Banjaran belum bisa menjangkau indikator kunci pengaturan CBT karena kurangnya kualifikasi yang dimiliki masyarakat dalam hal Pengembangan Desa Wisata, 2)Pengikutsertaan masyarakat sebagai aktor utama atau pengelola Desa Wisata Banjaran memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat dalam hal mengingatkan kemandirian dan peningkatan standar kehidupan yang lebih baik dengan berpartisipasi dalam upaya pengaturan konsep CBT. Peneliti berharap agar pengelolaan Desa Wisata Banjaran dapat dioptimalkan agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan yang benar-benar berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunitas Berbasis Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Desa Wisata

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup mendukung dalam upaya mendorong pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, dan brandingkan potensi daerah (Panitiyasa 2018). Menurut UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pada pasal 3 menyatakan bahwa pariwisata berfungsi untuk memberikan pemenuhan kepada wisatawan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Sama seperti yang diungkapkan oleh The ASEAN Secretariat (2016) bahwa secara internasional, sektor ekonomi pariwisata didominasi oleh usaha mikro yang

selalu menyediakan barang maupun jasa bagi pelanggan wisata yang datang berkunjung untuk menikmati produk wisata. Menurut Rakhman (2019) CBT tidak hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu saja, melainkan juga harus memiliki kebermanfaatannya bagi mayoritas masyarakat yang berada dalam lingkup wilayah yang ada. Artinya hadirnya pariwisata juga harus memiliki kebermanfaatannya positif bagi masyarakat dalam pengembangan potensi yang ada termasuk potensi wisata yang ada di lingkup desa. (Ekonomika et al. 2022).

Potensi Desa Wisata Banjaran sebagai desa wisata edukasi, sejarah & budaya merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul. Desa Wisata Banjaran didirikan oleh BUMDes Guwosari pada tahun 2016 yang kemudian aktif pada tahun 2018. Desa Wisata Banjaran dikenal dengan keindahan alamnya dengan menggabungkan berbagai jenis atraksi wisata. Atraksi wisata yang ada tersebut diantaranya: Peternakan, Pertanian (Lumbung Mataraman) Kuliner (Warung Banjaran), dan Bumi Perkemahan. Dalam pengelolaannya, Desa Wisata Banjaran memaksimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan wisata dengan cara mengakomodasi tenaga dari masyarakat setempat dalam proses pengelolaan Desa Wisata Banjaran. Hingga inilah yang menjadi momentum awal proses pengembangan Desa Wisata Banjaran berbasis masyarakat dilakukan.

Menurut Rahayu et al. (2016) *Community Based Tourism* merupakan konsep pembangunan pariwisata dengan mengikutsertakan peran masyarakat sebagai aktor utamanya dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi dan peningkatan standar kehidupan bagi masyarakat untuk lebih baik lagi. Sedangkan menurut Syarifah and Rochani (2021) *Community Based Tourism* merupakan pendekatan kepariwisataan yang bersumber dari masyarakat setempat dalam mengembangkan pariwisata di lingkup daerahnya. *Community Based Tourism* memiliki urgensi dalam memberikan kontribusi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan terutama pada aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Muhamad and Prima 2016). Dari beberapa definisi *Community Based Tourism* yang telah ada dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis *Community Based Tourism* merupakan pendekatan baru dengan memaksimalkan peran aktif masyarakat sebagai usaha pemberdayaan dalam mengelola produk wisata di lingkungan sekitarnya. Tentunya konsep pemberdayaan yang dimaksud merupakan sebuah konsep yang berasal dari pengetahuan, keterampilan dan kearifan masyarakat sekitar yang kemudian dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung untuk menikmati destinasi wisata yang ada (Irwan and Austang 2021). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata diharapkan dapat memberikan kebermanfaatannya dan juga kebermanfaatannya bagi wisatawan dalam menikmati setiap produk wisata yang dijual sebagai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (Yanes et al. 2019). Model yang digunakan oleh pariwisata berbasis masyarakat merupakan model yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan (Ernawati 2014). Dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata berkelanjutan setidaknya memuat beberapa hal diantaranya berkelanjutan dalam hal lingkungan, berkelanjutan dalam hal ekonomi, dan berkelanjutan dalam hal sosial budaya (Syafiqah et al. 2022). Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahapan pengawasan, dan evaluasi menjadi kontrol yang sangat efektif dalam menjamin pengembangan suatu objek wisata. Keberadaan pengaturan mengenai ketentuan daya tampung suatu objek wisata harus dilakukan dengan diskusi yang tentunya mengikutsertakan masyarakat lokal yang tentunya tidak berdasarkan atas kepentingan perseorangan (Wijaya and Sudarmawan 2019).

Dalam pengaplikasiannya, pariwisata berbasis CBT bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Masih terdapat beberapa kendala hingga mengakibatkan pengembangan Desa Wisata Banjaran belum bisa seluruhnya dilakukan secara optimal. Kendala yang ada tersebut diantaranya masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata sehingga perlu dilakukan pendekatan berbasis CBT yang komprehensif. Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan oleh BUMDes Guwosari yang membawahi dan melaksanakan Pengembangan Desa Wisata Banjaran belum cukup kuat untuk memberikan ruang yang cukup besar untuk melakukan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pengelola Desa Wisata Banjaran. Disamping itu keadaan masyarakat yang belum bisa mandiri berdaya secara finansial karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani maka ketika diikutsertakan pada pengelolaan Desa Wisata Banjaran akan membuat mereka memiliki pendapatan untuk bertahan hidup. Namun karena perbedaan pola pikir, sulitnya menyamakan mindset membuat pengelolaan yang ada menjadi terhambat karena proses pengelolaan yang dilakukan secara tidak pada tempatnya. Inilah alasan yang kemudian dipilih oleh Kalurahan Guwosari dan BUMDes Guwosari untuk bisa mengikutsertakan masyarakat dalam proses Pengembangan Desa Wisata Banjaran yang harapannya dapat menaikkan pendapatan masyarakat dan bisa memberdayakan masyarakat dari lini terkecil meskipun dalam pengaplikasiannya masih jauh dari yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penerapan CBT di Desa Wisata Banjaran sebagai salah satu potensi wisata yang menjadi produk wisata atraktif dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek kunci pengaturan komunitas berbasis masyarakat yang dilihat dari dukungan pemerintah, partisipasi *stakeholder*, pembagian keuntungan yang adil, penggunaan sumber daya lokal, dan penguatan institusi lokal. Pengelola Desa Wisata Banjaran adalah warga lokal dari 3 dusun sekitar yaitu Dusun Kembang Putih, Watu Geduk, dan Kentolan Lor yang totalnya berjumlah 59 orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mendapatkan informasi secara mendalam, mengidentifikasi temuan, menjabarkan data dari lapangan, dan mengevaluasi hasil temuan. Penelitian dilakukan di Desa Wisata Banjaran, Kabupaten Bantul. Secara spesifik membahas mengenai peran komunitas dalam pengelolaan Desa Wisata Banjaran berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT). Metode pengumpulan

data dilakukan melalui observasi di lapangan, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen terkait. Dalam tahap observasi ini, peneliti terjun langsung ke BUMDes Guvosari, Kalurahan Guvosari, dan Desa Wisata Banjaran untuk melihat dan mencari tahu masalah apa yang sebenarnya ditemukan. Wawancara dilakukan di Desa Wisata Banjaran yang dalam tahap wawancara ini, peneliti mewawancarai langsung Pengurus BUMDes Guvosari, Pengelola Desa Wisata Banjaran, dan Lurah Guvosari. Dalam tahap dokumentasi, peneliti mengambil data berupa gambar dari potensi wisata yang ada di Desa Wisata Guvosari. Selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui referensi atau literatur terkait topik yang diambil. Tahap analisis data diawali dengan mengelola data hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan menganalisis dari gambaran umum ke khusus, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan abstraksi untuk mendapatkan inti permasalahan selama proses penelitian berlangsung, kemudian dijabarkan dalam bentuk narasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dan diakhiri dengan menuliskan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Desa Wisata Banjaran merupakan desa wisata yang terletak di Kalurahan Guvosari, Kabupaten Bantul sebagai desa wisata edukasi, sejarah dan budaya karena memiliki potensi wisata yang begitu luar biasa untuk dikembangkan karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan Goa Selarong yang menjadi sebuah wisata penyangga dan pelengkap tempat Wisata Goa Selarong karena letaknya yang cukup dekat dengan Goa Selarong. Luas lahan Desa Wisata Banjaran ini sekitar 55.000 meter². Berdasarkan letak administrasinya Desa Wisata Banjaran terletak di 3 padukuhan sekaligus yaitu Dusun Watu Geduk, Dusun Kembang Putih, dan Dusun Kentolan Lor. Dinamisasi pariwisata yang ada akan membawa manfaat yang cukup besar bagi investor untuk membangun fasilitas yang dapat membangun segala fasilitas guna menunjang keberlangsungan tempat wisata (A'inun et al. 2015).



Gambar 1 Peta Desa Wisata Banjaran.
(Sumber: Data Peneliti, 2024)

1. Potensi Desa Wisata Banjaran

a. Kuliner (Warung Banjaran)

Kuliner menjadi salah satu produk unggulan di Desa Wisata Banjaran. Warung Banjaran sebagai salah satu jenis produk wisata yang ditawarkan kepada wisatawan ketika berkunjung di Desa Wisata Banjaran, Guvosari. Warung Banjaran menyediakan aneka minuman dan makanan. Pengelola Warung Banjaran berjumlah 4 orang dan semuanya merupakan warga masyarakat setempat.



Gambar 2 Warung Banjaran Desa Wisata Banjaran.
(Sumber: Data Peneliti, 2024)

b. Pertanian (Lumbung Mataraman)

Lumbung mataraman merupakan lumbung pangan hidup untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan di lingkungan keluarga sebagai percontohan bagi masyarakat yang harapannya dapat dilakukan di rumah masing-

masing. Langkah ini di inisiasi oleh DIY melalui Dana Keistimewaan yang kemudian di eksekusi oleh BUMDes Guwosari dengan memodifikasi kembali menjadi ketahanan pangan berbasis pengolahan sampah. Langkah tersebut diambil melihat isu permasalahan nasional yang cukup kompleks mengenai sampah dan pangan yang membuat konsep tersebut digabungkan untuk menekan permasalahan yang ada terkhusus di wilayah Guwosari. Di samping itu akademisi, mahasiswa, ataupun komunitas juga dapat melakukan studi pembelajaran terkait pertanian. Pengunjung juga dapat membeli ragam jenis sayuran dengan memetik langsung hasil tanaman tersebut. Pengelola Lumbung Mataraman berjumlah 30 orang dan merupakan warga lokal setempat dari 3 dusun, yaitu warga Watu Geduk, warga Kentolan Lor, dan warga Kembang Putih yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelompok Tani (POKTAN), dan Kelompok Wanita Tani (KWT).



Gambar 3 Lumbung Mataraman Desa Wisata Banjaran.
(Sumber: Data Peneliti, 2024)

c. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu bagian dari produk wisata yang ditawarkan di Desa Wisata Banjaran yang seluruh pengelolanya dikelola oleh warga masyarakat lokal. Terdapat 2 jenis peternakan yang dikelola Desa Wisata Banjaran yaitu ternak ayam dan ternak kambing. Masuknya jenis atraksi wisata peternakan ini sebagai salah satu hal yang ingin terus dilanjutkan karena sebelum didirikannya Desa Wisata Banjaran ini, lahan yang ada merupakan lahan bekas peternakan. Ada banyak komponen yang dimanfaatkan pengelola diantaranya kotoran kambing yang tidak dibuang begitu saja namun bisa dimanfaatkan dan dibuat pupuk kompos untuk penyubur tanaman di Lumbung Mataraman. Setiap satu pengelola kambing diberi tanggungjawab untuk mengelola 5 kambing. Jumlah pengelola ternak kambing dan ayam di Desa Wisata Banjaran berjumlah 25 orang.



Gambar 4 Peternakan Desa Wisata Banjaran.
(Sumber: Data Peneliti, 2024)

d. Bumi Perkemahan

Bumi perkemahan merupakan produk wisata yang dijual di Desa Wisata Banjaran. Lapangan yang luas dengan pemandangan yang asri menjadi nilai tambah ketika pengunjung menyewa tempat di Desa Wisata Banjaran untuk melakukan kegiatan perkemahan. Lapangan Desa Wisata Banjaran juga disewakan untuk melakukan outbond. Di samping lapangan juga terdapat sungai kecil yang dapat digunakan oleh peserta perkemahan yang ingin memacu adrenaline melalui susur sungai. Bumi perkemahan di Desa Wisata Banjaran dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang juga merupakan warga lokal Guwosari. Hal unik lainnya dari bumi perkemahan yang ada di Desa Wisata Banjaran ini adalah ketika pengunjung melakukan kegiatan perkemahan dan membutuhkan bahan sayuran untuk memasak, maka pengunjung dapat langsung memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli bahan yang diperlukan untuk memasak langsung ke petani yang ada di Lumbung Mataraman).



Gambar 5 Lapangan Bumi Perkemahan Desa Wisata Banjaran.
(Sumber: Data Peneliti, 2024)

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, pengelolaan Desa Wisata Banjaran sudah mengakomodir peran dan keikutsertaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan wisatanya. Pembangunan dengan menggunakan konsep komunitas harus mempertimbangkan sumber daya dan keunikan potensi wisata lokal agar berjalannya siklus kepariwisataan juga dapat berjalan dengan baik. pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai salah satu empowering bagi masyarakat yang sebelumnya berada dalam situasi tidak berdaya untuk bisa menjadi mandiri baik secara finansial dan peningkatan keterampilan. Hal ini akan menciptakan kuantitas serta kualitas hidup secara berkelanjutan melalui 5 pilar penguatan pengembangan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* menurut Teori Yaman & Mohd (2004).

2. Aspek Kunci Dalam Pengaturan Pengembangan Pariwisata Dengan Pendekatan Community Based Tourism(CBT)

a. Dukungan Pemerintah

Pengembangan aktivitas pengelolaan pariwisata tidak akan lepas dari peran pemerintah sebagai fasilitator dan penasihat dalam perjalanan sebuah pembangunan. Partisipasi Pemerintah Desa Guwosari senantiasa memberikan dukungan komprehensif terhadap pengelolaan Desa Wisata Banjaran dalam bentuk moral maupun material. Dalam bentuk moral pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi kemampuan dan pengetahuan mengenai pengelolaan Desa Wisata Banjaran melalui pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas dengan mengoptimalkan kolaborasi dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Provinsi DIY.

Secara material pemerintah desa juga memberikan support dalam bentuk anggaran untuk pembangunan di Desa Wisata Banjaran di setiap tahunnya yang angkanya tidak selalu sama dengan rincian data sebagai berikut: Tahun 2020 anggaran sebesar 20 Juta untuk modal pembangunan Gubuk, Lumbung, Toilet, dan Pompa Air Banjaran. Tahun 2020 anggaran sebesar 50 Juta untuk modal operasional pembangunan Banjaran. Tahun 2021 anggaran sebesar 250 Juta untuk Pembangunan Limasan, Hall, dan Peralatan Lahan dan juga mengusahakan pencarian donatur untuk pembangunan Desa Wisata Banjaran hingga mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi DIY melalui dana keistimewaan sebesar 700 juta yang dikhususkan untuk pengembangan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dukungan pemerintah terhadap pengembangan Desa Wisata Banjaran tidak melepaskan peran aktif masyarakat didalamnya. Pertama, masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan seperti turut serta dalam menyukseskan kegiatan seperti banyak yang aktif bertanya dalam proses kegiatan sesi tanya jawab. Kedua, dukungan pemerintah dalam hal pemberian anggaran kepada Desa Wisata Banjaran juga melibatkan peran masyarakat didalamnya seperti masyarakat sebagai pengelola Desa Wisata Banjaran yang ikut mengelola keuangan dari anggaran pemerintah tersebut, ikut serta menjaga dan merawat fasilitas yang ada. Masyarakat sebagai pengelola Desa Wisata Banjaran juga memiliki peran untuk mengontrol pengawasan pelaksanaan anggaran yang ada. namun hal ini tentunya tidak semua masyarakat mengetahui transparansi anggaran yang diterima Desa Wisata Banjaran untuk alokasi pembuatan fasilitas yang ada karena anggaran akan masuk lebih dulu BUMDes sebelum pada akhirnya dana tersebut dieksekusi untuk pengembangan Desa Wisata Banjaran.

b. Partisipasi Stakeholder

Kegiatan pariwisata tidak akan lepas dari peran beberapa pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan kepariwisataan seperti masyarakat, pemerintah, dan swasta. Partisipasi dari segala lapisan dimaksudkan untuk membentuk keberlanjutan destinasi wisata. Pada hakikatnya pelaksanaan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah dengan adanya kerjasama berupa koordinasi program kerja antara pemegang kepentingan dan kekuasaan yakni, pemerintah, swasta, dan masyarakat setempat (Sunaryo 2013). Pertama Pemerintah, dalam keterangan pemerintah desa, pembangunan Desa Wisata Banjaran bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan alam dengan terus menjaga alam dan melestarikannya dengan modifikasi wisata. Disamping itu tujuan lain dari pembangunan Desa Wisata Banjaran untuk

meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar dalam hal ekonomi. Upaya lain yang dilakukan pemerintah desa adalah memberikan dana anggaran yang di khususkan untuk pembangunan berkelanjutan dan memberikan dukungan lain dalam hal promosi wisata melalui website pemerintahan desa.

Dalam hal ini pemerintah memiliki peran sebagai sebagai berikut: (1)Pemerintah Memiliki Peran Untuk Memberikan Pelayanan guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam semua sektor salah satunya dalam bidang pariwisata. Hal ini terjadi karena pada praktiknya masyarakat tidak akan mungkin berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan tanpa adanya campur tangan pemerintah yang memberikan pelayanan ataupun memfasilitasi pengembangan pengelolaan Desa Wisata Banjaran. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Guwosari sangat banyak diantaranya mampu memberikan bantuan dalam bentuk moral maupun material. Pemerintah juga melayani diskusi bersama terkait Desa Wisata Banjaran bersama dengan BUMDes Guwosari. Artinya bahwa peran pemerintah dalam hal memberikan pelayanan sudah cukup baik karena posisi pemerintah sebagai fasilitator sudah mengakomodir peran dari masyarakat. (2)Pemerintah Memiliki Peran Untuk Mengatur. Artinya bahwa dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk mengarahkan sektor yang ada. Di Desa Wisata Banjaran pemerintah tetap mengawasi dan selalu melakukan monitoring yang cukup intensif pada pembangunan Desa Wisata Banjaran. Setiap akhir pekan Pengurus BUMDes selalu mengadakan monitoring di Desa Wisata Banjaran untuk mengevaluasi pengelolaan yang berlangsung. Pemerintah desa yaitu bagian ulu-ulu kesejahteraan masyarakat juga sering hadir dan memberikan arahan dalam proses evaluasi sehingga proses pengelolaan dapat terlaksana dengan baik. disamping itu pengaturan yang dilakukan pemerintah desa kepada Desa Wisata Banjaran adalah salah satu bagian dari konsep terselenggaranya RPJMD Guwosari mengenai kepariwisataan. (3)Peran Pemerintah Dalam Pembangunan. Pemerintah memiliki peran dalam hal pembangunan. Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan Desa Wisata Banjaran tentunya memiliki peran dalam melaksanakan pembangunan sebagai upaya untuk mempromosikan potensi desanya. Hal lainnya adalah ditemui ketika pembangunan Desa Wisata Banjaran ini adalah mengikutsertakan peran masyarakat dalam pembangunan sebagai salah satu solusi untuk memberikan pendapatan kepada warga masyarakat setempat yang kurang berdaya secara finansial. Pembangunan ini tidak dapat semudah dan secepat itu untuk dilakukan sehingga perlu dilakukan peraturan berupa SOP yang ada sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam pengembangan Desa Wisata Banjaran. (4)Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan. Di Desa Wisata Banjaran pemerintah desa mengakomodir peran aktif masyarakat bersama dengan Pengurus BUMDes Guwosari untuk memaksimalkan keikutsertaan masyarakat setempat dalam pengelolaan Desa Wisata Banjaran. Hal ini terjadi sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mandiri berdaya dalam bidang ekonomi. meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena kompetensi SDM yang rendah dan masih perlu ditingkatkan sehingga pemerintah sering melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan mengadakan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat lokal terkait pengelolaan pariwisata.

Kedua Swasta, dalam hal ini Desa Wisata Banjaran bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga diantaranya Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Bank BNI, Bank BRI, Kelompok Peternakan Sapi Dusun Kadisono, Universitas Amikom Yogyakarta, Universitas Alma Ata. Peran pihak ketiga dalam hal ini sangat diperlukan untuk eksistensi pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu hasil adanya kerjasama dari pihak ketiga ini Desa Wisata Banjaran juga telah mendapatkan dana hibah dari penelitian Universitas Alma Ata yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam memberikan modal tambahan untuk Pembangunan Mushola, Pengecoran Jalan, Tamanisasi, Tempat Bermain Anak, Meja Kursi Taman, dan Panggung Wisata.

Ketiga Masyarakat, peran masyarakat setempat dilibatkan dalam pengelolaan Desa Wisata Banjaran sebagai pelaksana aktivitas wisatawan. Masyarakat yang dilibatkan dalam hal ini ada pemuda, masyarakat lokal, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Kelompok Tani (POKTAN), dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Pengikutsertaan masyarakat dilakukan untuk memantau dan turut andil dalam pengelolaan secara adil dalam melakukan kegiatan pengenalan produk wisata kepada wisatawan hingga keterlibatan dalam penerapan strategi yang selanjutnya akan dilakukan bersama dengan penasihat dan penanggungjawab Desa Wisata Banjaran. Harapannya pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat kedepannya akan dapat memberikan perubahan terhadap aktivitas masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tempat wisata (Marlina 2019).

c. Pembagian Keuntungan yang Adil

Dalam hal ini keuntungan yang didapat tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung berupa bagi hasil saja namun juga dapat berupa keuntungan tidak langsung. Pertama keuntungan langsung, sistem kerja yang dilakukan di Desa Wisata Banjaran adalah kerjasama dan tidak terikat tentu saja tidak bisa seluruhnya mendapat gaji setiap bulan. Menurut penuturan pengurus BUMDes Guwosari Desa Wisata Banjaran menerapkan metode bagi hasil 30 70 yang artinya 30% untuk BUMDes Guwosari dan 70% untuk pengelola yaitu masyarakat lokal yang bekerja di Desa Wisata Banjaran. Pembagian dilakukan dengan adil dan merata dari hasil penjualan produk wisata yang di jual kepada wisatawan. Hingga saat ini BUMDes Guwosari juga ingin mengesahkan draft perjanjian kerja untuk Unit Warung Banjaran dengan pembagian keuntungan dengan hasil 40% untuk BUMDes dan 60% untuk pengelola Warung Banjaran yang semua pengelolanya merupakan warga masyarakat lokal sekitar kawasan Desa Wisata Banjaran. Kedua keuntungan tidak langsung, keikutsertaan masyarakat dalam hal ini tentunya diakomodasi oleh BUMDes karena masyarakat sebagai pengelola tentu saja sering mendapatkan pemahaman baru terkait apa yang sedang dijalani seperti pelatihan dari dinas terkait, penyuluhan, bahkan praktik langsung. Ilmu yang didapat tersebut banyak dieksekusi oleh masyarakat sawah masing-masing dalam penerapan teknik-teknik pengolahan pertanian untuk menghasilkan produk yang baik.

d. Penggunaan Sumber Daya Lokal

Dalam menjaga stabilitas perkembangan desa wisata edukasi, sejarah, dan budaya perlu adanya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pengelolaannya. Hal demikian dilakukan sebagai langkah untuk menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan ekonomi yang nantinya berdampak pada masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan memberikan pandangan baru kepada masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pengembangan kawasan daya tarik wisata. Namun dalam menjalankan kegiatannya nyatanya masyarakat lokal belum seluruhnya paham mengenai pengelolaan pariwisata karena perbedaan pola pikir dan juga perbedaan pendidikan. Desa Wisata Banjaran memang mengutamakan masyarakat dalam setiap proses kegiatannya, namun belum bisa memberikan spesifikasi secara menyeluruh kepada masyarakat akan regulasi, pemahaman, dan pengetahuan dalam mengelola desa wisata. Hal lain juga ditemui ketika pemasaran atau media promosi belum bisa mandiri dibuat pengelola Desa Wisata Banjaran sehingga untuk promosinya masih dilakukan oleh pengurus BUMDes dan pemerintah desa. Belum adanya surat perjanjian kerja yang mengikat di Desa Wisata Banjaran membuat pengelola pada akhirnya kurang bisa loyal terhadap proses pengelolaan di Desa Wisata Banjaran karena masyarakat berpikir bahwa menjadi pengelola di Desa Wisata Banjaran adalah sebuah pekerjaan sampingan dan belum menetap yang akibatnya berdampak pada proses pengelolaan yang belum bisa dilakukan dengan maksimal. Hal demikian menjadi tugas bersama baik dari BUMDes sebagai penanggungjawab untuk berusaha mengedukasi masyarakat, mengubah mindset warga dan cara mengelola wisata.

e. Penguatan Institusi Lokal

Dalam melaksanakan pengembangan pengelolaan desa wisata perlu diimbangi dengan peran berbagai pihak. Penguatan ini hanya dilakukan manakala semua elemen dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing. Desa Wisata Banjaran sudah mengikutsertakan keterlibatan masyarakat didalamnya. Namun yang menjadi hambatan dari hal demikian adalah kompetensi yang dimiliki pengelola masih sangatlah rendah dan belum menyeluruh paham mengenai manajemen organisasi pariwisata. Pengelola belum memiliki keterampilan bahasa Inggris dan belum memiliki pengelola di bagian IT untuk memasarkan produk wisatanya. Hal demikian terjadi karena BUMDes sebagai penanggungjawab pengelolaan Desa Wisata Banjaran belum bisa menjadikan masyarakat sebagai karyawan tetap di Desa Wisata Banjaran sehingga pergerakannya belum mengikat secara keseluruhan. Akibatnya loyalitas masyarakat setempat terhadap kinerja pengelolaan Desa Wisata Banjaran juga belum dapat dilakukan dengan maksimal. Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sudah diakomodir namun masih perlu ditingkatkan kompetensinya sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dalam proses penjualan produk wisata kepada wisatawan. Namun hal ini tetap diusahakan BUMDes untuk mengikat pengelola dengan membuat surat perjanjian kerja bagi masyarakat agar aktivitas pengembangan desa wisata Banjaran dapat berjalan dengan sistematis

SIMPULAN

Berdasarkan hasil simpulan dan pembahasan penelitian Pengembangan

Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Banjaran, Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pengelolaan Desa Wisata Banjaran dengan berbasis CBT berhasil dilakukan dengan hasil baik dengan melihat kunci pengaturan pariwisata dari beberapa aspek seperti dukungan pemerintah yang sangat maksimal sebagai fasilitator, partisipasi dari stakeholder yang senantiasa berupaya dan berusaha untuk aktivitas pengembangan, pembagian bagi hasil yang diperoleh pengelola dilakukan secara adil meskipun belum bisa dilakukan secara optimal karena belum adanya keterangan yang mengikat terkait status pengelola, adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan Desa Wisata Banjaran yang aktif dilakukan. Namun penguatan peningkatan kapasitas SDM masih perlu adanya upaya berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kompetensi keterampilan yang dimiliki pengelola Desa Wisata Banjaran. Hasil keseluruhan dari penelitian ini memberikan pandangan baru terhadap potensi CBT dalam pengelolaan Desa Wisata Banjaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A'inun, Fildzah et al. 2015. "Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism." 2:341–46. *Ekonomika*, Jurnal et al. 2022. "Pengembangan Sadar Wisata Melalui Strategi Pentahelix Bagi Masyarakat Desa Wonosalam ,." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2(1):161–72.
- Ernawati. 2014. "Tingkat Kesepian Desa Tihing-Klungkung, Bali Sebagai Desa Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Analisis Pariwisata Politeknik Negeri Bali* 1(10).
- Irwan, and Andi Austang. 2021. "Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan." Pp. 316–25 in *Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19*.
- Marlina, Neny. 2019. "Kemandirian Masyarakat Desa Wisata Dalam Perspektif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4(1):17–26. doi: 10.14710/jiip.v4i1.4735.
- Muhamad, and Anugrah Gusta Prima. 2016. "Implementation Of Sustainable Tourism Destination Development Achievements." Pp. 121–25 in *Hospitality and Tourism Industry*.
- Panitiyasa, I. Wayan. 2018. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 1(2).

- Rahayu, Sugi et al. 2016. "Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Penelitian Humaniora* 21(3):1–13.
- Rakhman, Cecep Ucu. 2019. "Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pariwisata Budaya Di Kota Cimahi." *Jurnal Pariwisata Pesona* 04(2):116–25.
- Sunaryo. 2013. "Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia."
- Syafiqah, Khairunnisa Khalda et al. 2022. "Implementasi Konsep Community Based Tourism (CBT) Dalam Mendukung Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Pada Destinasi Wisata Sanghyang Kenit Di Kabupaten Bandung Barat." 1(2):1–18.
- Syarifah, Rizki, and Agus Rochani. 2021. "Studi Literatur : Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kajian Ruang* 1(1):109–29.
- The ASEAN Secretariat. 2016. *ASEAN Community Based Tourism Standard*. Jakarta.
- Wijaya, Nyoman Surya, and I. Wayan Eka Sudarmawan. 2019. "Community Based Tourism (CBT) Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 10(1):77–98.
- Yanes, Andrea et al. 2019. "Community-Based Tourism in Developing Countries : A Framework for Policy Evaluation." *MDPI Journal* 1–23.